

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan berperan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian yang meliputi informasi dan persandian, komunikasi, teknologi informatika, statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Komunikasi dan informasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi hajat hidup perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas sebagai issue strategis pada 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyusunan rencana strategis untuk periode 5 (lima) tahun mendatang tentunya harus tidak lepas dengan permasalahan saat ini yang berkembang. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang saat ini berkembang sebagai dasar didapat beberapa hal sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang trampil dan profesional
2. Belum terintegrasinya sistem informasi dan database SKPD
3. Pemberdayaan potensi komunikasi masyarakat belum optimal
4. Infrastruktur sarana dan prasarana komunikasi dan informatika belum memadai

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan rencana strategis perangkat daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pacitan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021.

Visi Kabupaten Pacitan:

”MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”

Misi Kabupaten Pacitan :

Sesuai dengan visi “Maju Dan Sejahtera Bersama Rakyat”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016 – 2021 sebagai berikut :

Misi Pertama : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel

Misi Kedua : Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat

Misi Ketiga : Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai

Misi Keempat : Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini ditunjukkan melalui :

Pernyataan misi ke 1 : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih , efektif dan akuntabel

Pada misi pertama ini, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan akuntabel melalui penyelenggaraan e-govermen dalam pelayanan masyarakat..

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Pacitan juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program pembangunan, sebagai berikut:

- a. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
- b. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- c. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- d. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

3.3. Telaahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

a. Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai *leading sektor* di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015-2019

akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

b. Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur

Di dalam rencana strategis disebutkan bahwa visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan "*Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui TIK di Jawa Timur*". Sedangkan yang sesuai dengan urusan kewenangan pemerintah kabupaten adalah misinya pertama yakni, meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika. Misi pertama ini untuk mewujudkan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat serta lembaga komunikasi sosial yang diberdayakan melalui TIK di Jawa Timur.

Misi Kedua adalah mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Misi ini untuk mewujudkan infrastruktur TIK di daerah, pengembangan aplikasi yang diterapkan dilingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan adanya payung hukum/standarisasi dalam bidang urusan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Jawa Timur.

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2015 yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika perlu mempertimbangkan terjadinya permasalahan yaitu pergeseran paradigma yang terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta media yang berimbas pada model bisnis dan juga regulasi serta kebijakan yang terkait. Beberapa pergeseran yang perlu dicermati dan dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra 2010-2015 Bidang Komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

- a. Eksklusivitas sumber daya dan infrastruktur menjadi pemakaian bersama sumber daya dan infrastruktur.

- b. Arah komunikasi dari satu menjadi banyak arah (jaringan) dan semua elemen masyarakat turut berpartisipasi sebagai penyedia dan pengguna informasi.
- c. Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat belum optimal, karena media massa lebih dominan menyajikan konten hiburan, sementara jalur birokrasi untuk penyampaian informasi belum terkoordinasi dengan baik, baik antar lembaga pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah (hubungan pusat dan daerah) dalam informasi.
- d. Kecenderungan positif terjadi yaitu berkembangnya citizen journalism, dimana anggota masyarakat berperan melaporkan peristiwa yang terjadi disekitarnya.
- e. Perubahan kebudayaan dari yang manual berubah menjadi elektronik

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat, menjadi bagian dari keseharian masyarakat kita baik sebagai individu maupun kelompok dan lembaga termasuk jajaran Pemerintahan. Namun di sisi lain kecepatan ini belum mampu diimbangi oleh kecepatan proses adaptasi dari masyarakat, sehingga masih memunculkan kesenjangan yang semakin hari semakin bertambah.

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau biasa disebut e-government, dimaknai sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan public secara efisien, efektif dan interaktif. Hal ini merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi. Konsep ini telah menjadi pilihan dunia sebagai salah satu upaya dalam melakukan pembenahan administrasi pemerintahan di semua jajaran menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sampai dengan tahun ini Pemerintah Kabupaten Pacitan telah berupaya mengimplementasi e-government, namun secara substansif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya yang mencakup infrastruktur, konten, aplikasi, dan sumber daya manusia.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif merupakan tuntutan yang tidak mungkin lagi ditolak. Paradigma ini membawa konsekuensi pada perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan memberikan peluang seluas-luasnya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (*society participation*) dalam proses pembangunan bangsa.

Bidang komunikasi dan informatika telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar. Media komunikasi yang dikembangkan dengan dukungan teknologi sudah begitu maju dan mudah didapat oleh masyarakat, Meski demikian masih banyak warga masyarakat yang belum akrab dengan media – media tersebut dan masih membutuhkan media informasi yang diselenggarakan dalam bentuk konvensional seperti dialog interaktif, siaran keliling, sosialisasi – sosialisasi dan pertunjukan rakyat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksakannya. Dalam hal ini hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik mulai perencanaan, proses pembuatan sampai pelaksanaannya dijamin oleh undang-undang. Dan menjadi wajib hukumnya bagi pelayan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tantangan yang harus memperoleh perhatian adalah mempersiapkan diri baik bagi aparatur secara individu maupun kelembagaan dan mendorong tumbuhnya kesiapan dari semua

pihak, baik kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat secara umum.